

**STATE RATIONALITY IN POLICY MAKING : PERUBAHAN KEBIJAKAN
KOSOVO TERHADAP KOMUNITAS SERBIA DI KOSOVO UTARA PASCA
SERANGAN BANJSKA PERIODE 2023-2025**

Karolita Mariana Amer

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial, Budaya dan Politik

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

22044010027@student.upnjatim.ac.id

Derryl Jacobi Panjaitan

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial, Budaya dan Politik

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

22044010057@student.upnjatim.ac.id

PrihandonoWibowo

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial, Budaya dan Politik

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

prihandono_wibowo_wibowo.hi@upnjatim.ac.id

Submitted: December, 5th 2025 | Accepted: March 10th 2026

ABSTRAK

Serangan bersenjata di Banjska, Kosovo Utara, pada 24 September 2023 menjadi titik balik yang signifikan dalam hubungan antara pemerintah Kosovo dan komunitas Serbia di wilayah tersebut. Peristiwa ini memicu pengetatan kebijakan keamanan, penguatan kehadiran negara, serta perubahan pendekatan politik yang berorientasi pada stabilitas dan kedaulatan. Penelitian ini berfokus pada analisis dinamika kebijakan pemerintah Kosovo terhadap komunitas Serbia pasca-Serangan Banjska dalam rentang waktu 2023-2025. Penelitian ini menggunakan *Rational Actor Model* untuk memahami bagaimana pemerintah Kosovo merespons krisis dengan sumber daya terbatas, tekanan internasional, serta kepentingan politik domestik yang beragam untuk menentukan suatu kebijakan. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam tulisan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berdasarkan dari sejumlah literatur relevan dan artikel berita yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Kosovo

pasca-Serangan Banjska mencerminkan kombinasi antara upaya memperkuat kedaulatan negara dan keterbatasan dalam implementasi kebijakan, yang dipengaruhi oleh tekanan politik domestik, hubungan dengan Serbia, serta intervensi Uni Eropa dan NATO. Dengan menggunakan kerangka *Rational Actor Model*, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman komprehensif tentang bagaimana krisis keamanan memengaruhi kebijakan negara terhadap minoritas etnis di wilayah pascakonflik. Studi ini menyarankan perlunya pendekatan dialogis yang lebih inklusif untuk mengurangi ketegangan jangka panjang.

Kata Kunci: Kosovo, Komunitas Serbia, Banjska 2023, Kebijakan Keamanan, *Rational Actor Model*

ABSTRACT

The armed attack in Banjska, northern Kosovo, on 24 September 2023 marked a significant turning point in relations between the Government of Kosovo and the local Serbian community. The incident triggered tighter security policies, strengthened state presence, and shifts toward a more stability- and sovereignty-oriented political approach. This research focuses on analyzing the dynamics of Kosovo's policies toward the Serbian community following the Banjska attack within the 2023–2025 period. The study employs the Rational Actor Model to understand how the Government of Kosovo responded to the crisis while facing limited resources, international pressures, and diverse domestic political interests in formulating its policy choices. This research uses a qualitative descriptive method, with data collected through relevant literature and news articles related to the topic. The findings indicate that Kosovo's post-Banjska policies reflect a combination of efforts to reinforce state sovereignty and the constraints encountered in policy implementation. These outcomes are shaped by domestic political pressures, relations with Serbia, and the involvement of the European Union and NATO. Using the Rational Actor Model, this study aims to provide a comprehensive understanding of how security crises influence state policies toward ethnic minorities in post-conflict regions. The study suggests the need for a more inclusive and dialogic approach to reduce long-term tensions.

Keywords: Kosovo, Serbian Community, Banjska 2023, Security Policy, Rational Actor Model

PENDAHULUAN

Sejak perang antara Kosovo dan Serbia pada tahun 1999, konflik dan ketegangan politik, sosial, dan ekonomi terus mewarnai hubungan antara pemerintah Kosovo dengan komunitas Serbia yang tinggal di daerah utara dari wilayah itu. Meskipun Kosovo sudah mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 2008, masih ditemukan sejumlah warga Serbia di wilayah utara yang masih berdedikasi secara politik dan emosional kepada Serbia, hal ini kemudian dianggap sebagai strategi pemerintah Serbia untuk mempertahankan pengaruhnya (Fella, 2024). Data statistik yang dirilis oleh Kantor Statistik Kosovo dengan standar Eurostat tahun 2008 menyebutkan total etnis Serbia di Kosovo sebesar 5,3% dari 2,1 juta penduduk Kosovo (BIRN, 2008). Hampir 40.000 komunitas Serbia di Mitrovica Utara,

Leposavić, Zvečan, dan Zubin Potok di utara Kosovo menolak mengakui kemerdekaan Kosovo pada tahun 2008. Mereka tidak mau tunduk pada otoritas Pristina/pemerintah Kosovo dan justru bergantung pada Belgrade/pemerintah Serbia (Geoghegan, 2013).

Hingga pada tahun 2021, dinamika interaksi antara komunitas Serbia dan pemerintah Kosovo menunjukkan eskalasi ketegangan yang berpotensi memicu ketidakstabilan di wilayah tersebut. Pada 2021, pemerintah Kosovo mewajibkan penggunaan pelat nomor Kosovo untuk menegaskan kedaulatan negaranya, termasuk di wilayah utara yang mayoritas Serbia. Namun, warga Serbia menolak karena masih menganggap diri bagian dari Serbia yang mengakibatkan aksi blokade dan bentrokan dengan polisi. Pada tahun berikutnya, pejabat Serbia dari lembaga-lembaga resmi Kosovo di utara Kosovo mundur massal pada November 2022. Atas kemunduran ini, pemerintah Kosovo kehilangan kendali atas wilayah itu. Meski secara resmi keluar dari lembaga Kosovo, mereka tetap bekerja namun hanya tunduk pada instruksi pemerintah Serbia di Beograd (Prelec, 2023).

Ketegangan mulai muncul pada April 2023, ketika komunitas Serbia di Kosovo memboikot pemilu dan melakukan serangkaian demonstrasi menentang terpilihnya pejabat Albania di daerah-daerah mayoritas Serbia di utara Kosovo. Aksi tersebut memicu bentrokan dan penangkapan, dengan pasukan NATO dan polisi berhadapan dengan para demonstran Serbia. Menyusul penggerebakan polisi terhadap sejumlah bangunan milik warga Serbia pada Mei 2023, Serbia mengerahkan pasukan militernya ke perbatasan Kosovo, menimbulkan kekhawatiran akan pecahnya kembali konflik. Sebagai tanggapan, NATO menurunkan tambahan 700 personel untuk menjaga keamanan, sementara Uni Eropa berupaya melanjutkan dialog antara kedua pihak (Chary, 2023).

Serangan di Banjska terjadi pada Minggu, 24 September 2023, ketika sekitar 30 orang Serbia bersenjata lengkap membarikade diri di sebuah biara Ortodoks di Kosovo utara. Aksi tersebut memicu baku tembak sengit dengan kepolisian Kosovo yang berlangsung sepanjang hari. Dalam insiden itu, seorang polisi Kosovo tewas dan tiga orang penyerang berhasil dilumpuhkan. Setelah bentrokan, polisi Kosovo melanjutkan operasi penyisiran, termasuk menggeledah kendaraan di sekitar jalan menuju biara, dan menemukan sejumlah besar senjata serta peralatan militer. Perdana Menteri Kosovo, Albin Kurti, menuding bahwa para penyerang tersebut dikirim oleh Serbia, sementara Presiden Serbia, Aleksandar Vučić, membantah tuduhan itu dan menyatakan bahwa mereka adalah warga Serbia Kosovo yang sudah muak dengan kebijakan pemerintah Kurti (Associated Press, 2023).

NATO melalui misi KFOR tetap bersiaga dengan sekitar 4.500 pasukan dan menyatakan kesiapan untuk menambah jumlah personel bila diperlukan. Di sisi lain, Amerika Serikat mendesak Serbia agar menarik pasukannya dari perbatasan Kosovo demi mencegah eskalasi lebih lanjut. Perkembangan ini juga mendorong perubahan sikap dari Amerika Serikat dan Uni Eropa. Jika sebelumnya kedua aktor internasional tersebut lebih banyak

menyoroti Perdana Menteri Kosovo, Albin Kurti, sebagai pihak yang memperburuk ketegangan, kini fokus kritik mulai bergeser kepada Serbia yang dipandang sebagai aktor pengacau dalam konflik pasca-serangan di Banjska (Bechev, 2023).

Setelah serangan Banjska, polisi Kosovo melalui Direktorat Unit Intervensi Cepat mengambil langkah keamanan dengan menutup 30 jalan ilegal yang menghubungkan Kosovo dengan Serbia. Jalan-jalan tersebut sebelumnya kerap digunakan untuk penyelundupan, pergerakan kelompok kriminal, maupun masuknya kelompok bersenjata. Penutupan dilakukan dengan cara memasang penghalang, menggali parit, serta patroli rutin yang juga memanfaatkan drone. Seluruh langkah ini dijalankan bersama KFOR, pasukan NATO di Kosovo, yang melibatkan kontribusi dari Inggris, Amerika, Rumania, dan Yunani. NATO sendiri memperkuat kehadirannya dengan menambah ratusan pasukan cadangan, termasuk 200 tentara Inggris dan 130 tentara Rumania, sebagai respons terhadap meningkatnya ketegangan yang dinilai berbahaya (KOHA, 2023).

Mulai 1 Februari 2024, pemerintah Kosovo menerapkan aturan baru yang melarang penggunaan Dinar Serbia di wilayah mayoritas etnis Serbia di utara Kosovo. Semua transaksi wajib menggunakan Euro, mata uang resmi yang sudah dipakai di wilayah lain Kosovo. Kebijakan ini langsung memicu keresahan karena banyak warga Serbia di utara masih bergantung pada Dinar, terutama untuk menerima bantuan sosial dari pemerintah Serbia. Polisi Kosovo melakukan penggerebekan terhadap kantor organisasi dan institusi yang dikelola Serbia, menyita dokumen serta komputer, bahkan menutup beberapa kantor. Mereka juga berusaha menyita kendaraan pembawa Dinar tunai. Uni Eropa dan Amerika Serikat menyatakan keprihatinan, menilai kebijakan ini bisa memperburuk ketegangan etnis dan membatasi akses warga Serbia terhadap layanan sosial dasar. Wakil Perdana Menteri Besnik Bislimi menyatakan bahwa aturan baru tidak bertujuan merugikan warga dan akan diterapkan tanpa menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Langkah ini datang setelah upaya normalisasi hubungan Serbia-Kosovo yang dimediasi UE sejak 2023 mandek, terutama setelah bentrokan bersenjata di Banjska pada September 2023 yang menewaskan empat orang (AP News, 2024).

Pada 20 Mei 2024, *Associated Press* melaporkan bahwa polisi Kosovo menutup enam cabang Postanska Stedionica (Postal Saving Bank) milik Serbia di wilayah utara yang mayoritas dihuni etnis Serbia. Dalam operasi itu, polisi menyita sekitar €1,6 juta dan 75 juta dinar Serbia yang tersimpan di dalam bank. Langkah ini dianggap bagian dari penerapan aturan baru Kosovo yang melarang penggunaan dinar Serbia dan mewajibkan semua transaksi menggunakan euro. Langkah ini dilakukan untuk menegakkan aturan baru yang melarang penggunaan dinar dan mewajibkan euro. Tindakan tersebut langsung menuai kritik dari Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Inggris karena dinilai sepihak dan berisiko

memperburuk ketegangan, sementara Serbia menuduh Kosovo mempersulit kehidupan warganya di utara yang masih bergantung pada bantuan dari Beograd (AP News, 2024).

Pada 15 Januari 2025, pemerintah Kosovo mengumumkan bahwa semua institusi paralel milik Serbia di wilayahnya resmi ditutup. Operasi besar yang dilakukan polisi menargetkan kantor pos dan pajak di sepuluh kota, termasuk Lipjan, Obiliq, Prishtina, dan Gracanica. Polisi Kosovo menutup 19 kantor layanan Serbia karena dianggap sebagai institusi ilegal dan menjadi penghubung aktivitas kriminal dan tindakan lain yang mengancam keamanan dan tatanan hukum Kosovo. Menteri Dalam Negeri Kosovo, Xhelal Sveçla, menganggap tindakan penutupan ini sebagai pemberatasan munisipalitas dan dualisme paralel (EWB, 2025). Selain itu, Menteri Pemerintahan Lokal, Elbert Krasniqi menegaskan bahwa total 28 kota paralel dan lima distrik buatan Serbia telah ditutup secara permanen. Reaksi keras datang dari Beograd. Kepala Kantor Serbia untuk Kosovo, Petar Petkovic, menyebut operasi ini sebagai “aksi teror” dan langsung keluar dari perundingan di Brussel mengenai orang hilang pada masa perang. Serbia menilai penutupan itu memutus layanan penting bagi komunitas Serbia di Kosovo yang sejak lama didukung pendanaan dari Beograd. Meski begitu, langkah ini menyisakan kontroversi. Kejaksaan Kosovo menolak memberi persetujuan atas operasi di wilayah Pristina, termasuk penutupan kantor pos dan pajak di Gracanica. Alasan penolakan itu belum diumumkan, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai dasar hukum penuh dari operasi tersebut (Bami & Stojanovic, 2025). Langkah-langkah kebijakan tersebut menunjukkan kecenderungan pemerintah Kosovo untuk memperkuat kontrol negara dan pendekatan keamanan di wilayah Kosovo Utara, sekaligus membatasi pengaruh Serbia terhadap komunitas Serbia setempat sebagai respon terhadap meningkatnya eskalasi konflik pasca-Serangan Banjska.

KERANGKA BERPIKIR

Rational Actor Model

Graham Allison dalam karyanya “*Essence of Decision Making: Explaining Cuban Missile Crisis*” memperkenalkan *Rational Actor Model* dalam rangka menekankan rasionalitas dalam pembuatan suatu keputusan maupun kebijakan untuk masalah atau konflik. Penggunaan model aktor rasional dalam menentukan keputusan akhir berguna untuk menjawab pertanyaan terkait latar belakang munculnya sebuah peristiwa, keputusan akhir tersebut telah melewati beberapa tahapan *Goals and Objectives*, *Alternatives*, *Consequences*, dan *Choice*. Keempat tahapan ini merupakan inti dari *rational actor model*. Konsep *rational actor model* menyatakan bahwa negara sebagai aktor rasional yang cakap dalam hal informasi tentang kondisi dan pilihan yang ada. Ketika dihadapkan pada sebuah situasi, negara dituntut untuk mempertimbangkan dengan cermat semua kemungkinan tindakan dan memilih yang terbaik untuk mencapai tujuan mereka. Pemerintah sebagai aktor utama harus memeriksa

serangkaian tujuan, mengevaluasi mereka berdasarkan kegunaannya, lalu memilih yang memiliki hasil atau manfaat yang dianggap dapat memenuhi kepentingan negara (Allison, 1971).

Allison juga menjelaskan unit dasar analisa dalam konsep ini : 1. *Unified National Actor*, yang berarti pemerintah merupakan aktor yang bersatu dan pemangku kebijakan yang rasional. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah semata-mata untuk kepentingan nasional. 2. Masalah, keputusan atau kebijakan yang dibentuk bertujuan untuk menjaga keamanan dan kepentingan nasional. Dibuat karena adanya kebutuhan atau tekanan eksternal. 3. Tindakan sebagai pilihan yang rasional karena sudah melalui tahapan : *Goals and Objectives, Alternatives, Consequences*, dan *Choice* sehingga menghasilkan keputusan yang ideal dan rasional (Setiawan & Sulastri, 2017).

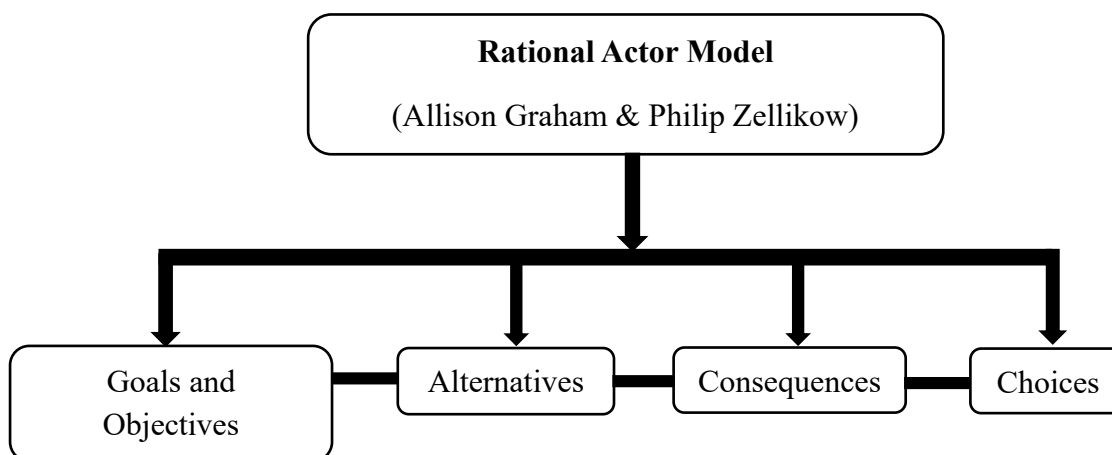
Allison dan Zelikow (1999) dalam "*Essence of Decision Making: Explaining Cuban Missile Crisis 2nd Edition*" menjelaskan inti dari RAM dalam 4 bagian :

1. *Goals and Objectives* : Dalam tahap ini keputusan yang ditentukan oleh negara berdasarkan tujuan dan nilai tertentu. Tujuan dan nilai ini dijelaskan sebagai *payoff* atau *utility* yang merupakan ukuran manfaat atau kepuasan strategis untuk sebuah tindakan. Keduanya merupakan penerapan proses preferensi dalam proses pengambilan keputusan. Hasil dari penerapan preferensi ini akan menunjukkan urutan atau ranking kebijakan yang mendekati atau memenuhi *Goals* dan *Objectives* negara (Graham & Zelikow, 1999).
2. *Alternatives* : Aktor rasional akan menentukan beberapa alternatif tindakan yang tersedia dalam suatu situasi dan memilihnya sebagai kebijakan yang rasional. Alternatif tersebut biasanya digambarkan melalui decision tree dan memiliki perbedaan yang cukup jelas. Kebijakan tersebut merupakan kombinasi dari putusan kecil yang membentuk satu arah kebijakan (Graham & Zelikow, 1999).
3. *Consequences* : Apabila aktor rasional tersebut memilih satu alternatif tertentu, maka konsekuensi itulah yang akan terjadi. Beberapa teori rasional menganggap penentuan akibat dari kebijakan tersebut dapat dinilai dari kemampuan berpikir dari aktor rasional, sementara teori lainnya berasumsi bahwa prediksi tersebut sering tidak sempurna (Graham & Zelikow, 1999).
4. *Choice* : Keputusan yang rasional adalah yang memberikan hasil paling tinggi atau paling diminati berdasarkan preferensi dan tujuan agen tersebut (Graham & Zelikow, 1999).

Samual DeCanio menjelaskan model ini berakar pada prinsip Rational Choice Theory. Dalam tulisannya, dia menjelaskan bahwa setiap kebijakan diambil berdasarkan pertimbangan rasional atas biaya dan manfaat dari berbagai alternatif tindakan. Pemerintah bertindak sebagai aktor tunggal yang menimbang dua atau lebih opsi kebijakan masing-

masing dengan konsekuensinya sendiri sebelum memutuskan langkah yang dianggap paling menguntungkan bagi kepentingan nasional (DeCanio, 2025).

Berikut bagan sintesa pemikiran dari konsep *Rational Actor Model* untuk menjelaskan isi penelitian ini.



Sumber : Penulis

Sintesa pemikiran dalam penelitian ini merujuk pada proses integrasi keempat tahapan dalam kerangka *Rational Actor Model* dalam pengambilan keputusan negara sebagai respon pada eskalasi konflik di Kosovo Utara pada periode 2023-2025. Pada tahap pertama, *Goals and Objectives*, pemerintah Kosovo menetapkan tujuan utama berupa pemulihan stabilitas keamanan, penegasan kedaulatan negara, dan penguatan kontrol institusional di wilayah Kosovo Utara pasca-Serangan Banjska. Pada tahap *Alternatives*, pemerintah mempertimbangkan berbagai opsi kebijakan, mulai dari pendekatan dialogis yang dimediasi aktor internasional hingga penerapan langkah-langkah keamanan dan administratif yang lebih ketat. Tahap *Consequences* mencerminkan pertimbangan rasional pemerintah terhadap dampak masing-masing alternatif, termasuk risiko eskalasi konflik, resistensi dari komunitas Serbia di Kosovo Utara, serta tekanan politik dari Uni Eropa dan NATO. Berdasarkan evaluasi ketiga tahapan tersebut, tahap *Choice* menunjukkan keputusan pemerintah Kosovo untuk memprioritaskan kebijakan yang menekankan pendekatan keamanan dan penegasan otoritas negara sebagai pilihan yang dinilai paling rasional dalam konteks konflik domestik yang melibatkan aktor internasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, Creswell menjelaskan penelitian kualitatif menekankan pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena berdasarkan pengalaman dan pandangan partisipan. Data yang digunakan berupa kata-kata yang akan dianalisis untuk menemukan makna atau tema yang muncul dari pengalaman tersebut (Creswell, 2009). Data yang digunakan untuk penelitian ini diambil dari media berita Balkan, Associated Press, KOHA News, serta perjanjian-perjanjian yang telah dibuat sebelum konflik

antara dua negara ini terjadi. Metode yang digunakan adalah metode eksplanatif, metode ini berusaha menjelaskan hubungan sebab-akibat antara variabel, dengan menelusuri alasan mengapa dan bagaimana suatu fenomena terjadi. Pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penggunaan data sekunder sebagai sumber informasi yang digunakan. Data sekunder merupakan data yang tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti, melainkan berasal dari sumber lain. Sumber data bisa berupa hasil penelitian, laporan, atau catatan yang sudah ada sebelumnya dan dapat digunakan kembali untuk mendukung penelitian baru (Boslaugh, 2007).

PEMBAHASAN

1. Goals and Objectives

Kepentingan Kosovo di bagian utara sangat penting untuk kedaulatan negara, kepentingan politik, dan keamanan warga Kosovo. Konflik Banjska sangat membekas bagi kestabilan wilayah tersebut sehingga pemerintah Kosovo perlu melakukan pendekatan yang lebih agresif. Dengan situasi komunitas Serbia yang menolak kebijakan dari pemerintah Kosovo dapat menghambat proses kedaulatan negara ini. Serangan Banjska dipandang sebagai bentuk eskalasi kekerasan bersenjata yang secara langsung menantang otoritas dan kebijakan pemerintah Kosovo di wilayah Kosovo Utara. Aksi tembak-menembak antara kelompok bersenjata dan aparat keamanan Kosovo menciptakan kondisi instabilitas keamanan yang serius di kawasan tersebut. Situasi ini mendorong kebutuhan akan kebijakan yang lebih restriktif sebagai upaya melindungi keselamatan warga sipil sekaligus mempertahankan kedaulatan teritorial Kosovo. Sebelum terjadinya konflik Banjska, kebijakan pemerintah Kosovo terhadap komunitas Serbia di wilayah utara relatif diarahkan pada upaya penyaluran kebutuhan masyarakat serta penegakan hukum secara normatif. Namun, penolakan yang berkelanjutan dari komunitas Serbia terhadap kebijakan tersebut menunjukkan keterbatasan pendekatan sebelumnya dalam memastikan kepatuhan terhadap otoritas negara. Pasca-Serangan Banjska, pemerintah Kosovo mulai memprioritaskan penerapan kebijakan yang bersifat lebih mengikat dan ketat guna memastikan komunitas tersebut berada dalam pengawasan dan kerangka hukum negara.

Keterlibatan Uni Eropa dalam upaya resolusi konflik menunjukkan bahwa eskalasi pasca-Banjska telah melampaui kapasitas pengelolaan domestik semata. Namun, keterbatasan diplomasi tersebut, khususnya akibat penolakan Serbia untuk memberikan pengakuan *de facto* terhadap Kosovo, mempersempit ruang kompromi yang tersedia. Kondisi ini mendorong pemerintah Kosovo untuk mempertimbangkan langkah kebijakan yang lebih progresif dan tegas sebagai respons terhadap stagnasi diplomatik. Dalam "*Belgrade-Pristina Dialogue: Agreement on the path to normalisation between Kosovo and Serbia*" yang dirilis

pada 27 Februari 2023 oleh European External Action Service Team, Serbia menolak secara implisit atau tidak mengimplementasikan beberapa pasal, yaitu :

Article 4

The Parties proceed on the assumption that neither of the two can represent the other in the international sphere or act on its behalf.

Serbia will not object to Kosovo's membership in any international organisation.

Article 5

Neither Party will block, nor encourage others to block, the other Party's progress in their respective EU path based on their own merits. Both Parties shall respect the values referred to in Articles 2 and 21 of the Treaty of the European Union.

Article 7

Both Parties commit to establish specific arrangements and guarantees, in accordance with relevant Council of Europe instruments and by drawing on existing European experiences, to ensure an appropriate level of self-management for the Serbian community in Kosovo and ability for service provision in specific areas, including the possibility for financial support by Serbia and a direct communication channel for the Serbian community to the Government of Kosovo.

The Parties shall formalise the status of the Serbian Orthodox Church in Kosovo and afford strong level of protection to the Serbian religious and cultural heritage sites, in line with existing European models.

Article 11

Both Parties commit to respect the Implementation Roadmap annexed to this Agreement.

Kosovo mempermasalahkan kurang lebih dua pasal terkait yaitu pasal 4 dan 7. Pada pasal 4, Kosovo sangat dirugikan atas pemblokiran terhadap Kosovo untuk menjadi anggota dari beberapa organisasi internasional dan melobi negara-negara lain agar memberlakukan tindakan tersebut kepada Kosovo. Sedangkan pada pasal 7 tidak dijalankan oleh Kosovo karena harus memberikan otonomi dan *self-management* untuk komunitas Serbia. Penolakan ini berdasarkan atas kelemahan kedaulatan Kosovo di bagian utara wilayahnya (International Crisis Group, 2024). Ketika pasal-pasal dalam kerangka diplomasi tersebut mengalami stagnasi dalam implementasinya, pemerintah Kosovo dipaksa untuk mempertimbangkan langkah kebijakan alternatif yang bersifat lebih unilateral terhadap seluruh masyarakat yang berada dalam yurisdiksinya. Serangan Banjska menjadi indikator bahwa kebijakan sebelumnya masih menyisakan ruang bagi pelanggaran oleh kelompok tertentu yang tidak sepenuhnya mematuhi otoritas negara. Mengacu pada respon komunitas tersebut terhadap kebijakan yang ada, pemerintah Kosovo menilai perlunya evaluasi atas

efektivitas pendekatan sebelumnya dan memprioritaskan penerapan kebijakan yang bersifat lebih mengikat guna memastikan kepatuhan terhadap kerangka hukum negara.

Poin turunan dari tujuan Kosovo memberlakukan kebijakan baru bagi komunitas Serbia di Utara Kosovo sejak tahun 2023 hingga 2025 yaitu :

a. Mempertahankan pengaruh politik Kosovo di utara Kosovo

Setelah konflik Banjska berhasil diredakan, Kosovo memanfaatkan momentum tersebut untuk memberlakukan tiga kebijakan agresif yaitu penggunaan plat resmi Kosovo, pelarangan penggunaan Dinar Serbia, dan menutup institusi paralel Serbia. Hal ini dilakukan agar komunitas Serbia tunduk pada otoritas Pristina dan memegang kontrol atas wilayah tersebut. Kebijakan yang bersifat lebih agresif dipandang rasional karena didorong oleh kebutuhan mendesak akan stabilitas keamanan di wilayah Banjska serta keterbatasan efektivitas kebijakan yang diterapkan sebelum terjadinya konflik. Pemerintah Kosovo sejatinya telah menerapkan pendekatan kebijakan yang cenderung unilateral sejak 2021, namun eskalasi kekerasan di Banjska yang terjadi di kawasan sensitif seperti biara Ortodoks memperbesar ketegangan antara pemerintah Kosovo dan komunitas Serbia di Kosovo Utara. Dalam kondisi ketika upaya diplomasi tidak berjalan secara optimal, pemerintah Kosovo memandang perlunya mempertahankan dan menegaskan pengaruh negara di wilayah yurisdiksinya agar kawasan tersebut tidak menjadi ruang bagi aktor eksternal untuk melakukan intervensi terhadap kebijakan domestik Kosovo. Seiring dengan upaya diplomatik Kosovo di tingkat internasional, termasuk dalam proses liberalisasi dan penguatan citra sebagai negara berdaulat, strategi kebijakan yang lebih tegas ini mencerminkan pilihan rasional untuk menjaga keamanan, kedaulatan, dan kontrol negara secara menyeluruh.

Dalam *“Annual Review of Kosovo’s Foreign Policy 2023”* yang dikeluarkan oleh Prishtina Institute for Political Studies disebutkan bahwa dalam selama 2023, Perdana Menteri Albin Kurti melakukan diplomasi internasional ke negara Eropa maupun non-Eropa dengan membawa tiga tujuan utama yaitu : 1. *Economic Development*; 2. Demokrasi; 3. Supremasi Hukum. Kosovo berhasil melakukan liberalisasi visa Uni Eropa yang mulai berlaku pada Januari 2024 dan mendapat kemajuan menuju keanggotaan Dewan Eropa, walau masih belum berhasil masuk ke organisasi besar lain seperti Interpol atau UNESCO. Kosovo masih menghadapi tantangan besar dalam mendapatkan pengakuan internasional baru dan memperkuat koordinasi dengan mitra luar negeri (Krasniqi, 2024). Upaya Kosovo untuk dalam membangun negara yang stabil, demokrasi, dan berkomitmen kepada supremasi hukum. Hubungan diplomatik yang terjalin dengan negara Eropa dan non-Eropa menunjukkan kelayakan Kosovo sebagai negara yang berdaulat untuk menjalin kerja sama yang lebih luas serta masuk ke dalam organisasi internasional. Kosovo juga berupaya

mempertahankan pengaruh politiknya dengan cara memperkuat citra sebagai negara yang dewasa secara politik dan layak diperlakukan sebagai aktor internasional yang setara.

- b. Mencegah perluasan pengaruh pemerintah Serbia atas pengambilan keputusan dan kebijakan terhadap komunitas Serbia di utara Kosovo

Posisi Kosovo di komunitas Internasional menimbulkan kerugian strategis karena pengaruh Serbia dalam proses masuk sebagai anggota, Serbia dapat melakukan intervensi terhadap kebijakan Kosovo terhadap kelompok yang masih menetap di wilayahnya. Kebijakan progresif yang dinilai diskriminatif merupakan hasil dari respon komunitas tersebut terhadap kebijakan Pristina dan operasi militer untuk manajemen konflik yang sudah ada dan mencegah konflik baru muncul. Tindakan boikot pemilu dan penolakan penggunaan plat resmi merupakan bentuk penolakan atas penegakan hukum dan kedaulatan negara.

Pada November 2022, polisi, hakim, jaksa, serta staf administrasi yang berjumlah lebih dari 600 anggota mengundurkan diri secara massal dari institusi negara Kosovo pasca *Serbian List* mengundurkan diri dari pemerintahan Kosovo. Untuk menjaga keamanan dan peradilan di wilayah utara, terjadi *rearrangement reaction* dalam hal rencana kerja, pemindahan hakim serta staf, dan penanganan kasus-kasus mendesak. Pegawai serbia yang mengundurkan diri tidak lagi menerima gaji, beban kerja yang tertinggal harus ditangani oleh aparat yang tersisa serta personel tambahan yang dipindahkan sementara (KOHA, 2024). Reorganisasi ini juga akan berdampak pada keberhasilan penghapusan penggunaan Dinar Serbia sebagai alat transaksi dan menghilangkan ruang Serbia untuk memblokir keputusan lembaga negara.

Dual Authority yang terjadi antara Kosovo dan Serbia sering menimbulkan ketegangan sehingga beberapa kebijakan Kosovo dianggap kontroversial, ambiguitas yang terjadi antara kedua negara ini dipertegas oleh Kosovo dengan melakukan reorganisasi agar memperkuat integrasi wilayah utara dan mempertegas kedaulatannya. Kosovo yang masih tergolong negara kecil dalam negara Balkan harus mengambil langkah keras dan memprioritaskan kepentingan negara untuk memperkuat kontrol terutama untuk wilayah dengan posibilitas konflik paling tinggi. Posisi Serbia yang menolak kedaulatan Kosovo dan keanggotaannya dalam organisasi internasional menegaskan kembali mengapa kebijakan Kosovo lebih keras terhadap kelompok yang menentang kedaulatannya. Dibandingkan Kosovo, Serbia mempunyai kekuatan untuk mengatur strategi internasional untuk mencegah pengakuan Kosovo sebagai sebuah negara. Keberadaan *dual authority* menopang posisi komunitas Serbia di Kosovo Utara yang tetap terhubung secara politik dan administratif dengan Beograd. Kondisi ini menjadikan komunitas Serbia sebagai faktor kunci yang memperluas pengaruh Serbia di dalam wilayah Kosovo serta secara langsung memengaruhi kapasitas pemerintah Kosovo dalam merumuskan dan menegakkan kebijakan.

2. Alternatives

Sejak 2023 hingga 2025, kebijakan Kosovo terhadap komunitas Serbia di Kosovo Utara masih dianggap kontroversial dan memicu ketegangan antara kedua negara tersebut. Dalam kerangka *Rational Actor Model*, setelah menemukan *Goals and Objectives* dari kebijakan luar negeri suatu negara, peneliti diarahkan pada bagian *Alternatives* yang merupakan analisis opsi tidak terpilih sebagai sebuah kebijakan yang masuk akal untuk mencapai tujuan negara. Dalam kasus kebijakan luar negeri Kosovo dengan Serbia, terdapat beberapa opsi masuk akal yang tidak dipilih Pristina. Hal ini sudah dipertimbangkan dengan probabilitas kebijakan dalam memenuhi tujuan negara, keuntungan bagi Kosovo, dan yang terpenting membatasi intervensi Serbia.

1. Opsi *Joint-Policing* dalam Pengawasan Uni Eropa di Daerah Perbatasan

Pasca konflik Banjska, Pristina banyak melakukan operasi militer untuk mencegah serangan lanjutan. Dalam laporan KOHA News, polisi Kosovo menutup 30 jalan ilegal yang menghubungkan Kosovo dengan Serbia (KOHA, 2023). Dari perspektif *Rational Actor Model*, opsi *Joint-Policing* menjadi alternatif kebijakan karena membantu komunitas tersebut mengelola alokasi bantuan dari Serbia ke Kosovo Utara tanpa intervensi Beograd yang berlebihan. Sistem dan administrasi terkait keamanan dan operasi militer mengikuti kerangka kerja institusi namun dengan standar preseden Uni Eropa. Model kerja sama ini dapat mengurangi ketegangan dan mencegah blokade jalan, sekaligus menjaga operasi tetap berada di bawah kerangka hukum Kosovo.

Namun, Kosovo tidak memilih opsi ini karena berisiko memperkuat persepsi *dual authority* dan memungkinkan Serbia memengaruhi tata kelola keamanan secara tidak langsung. Kondisi ini berpotensi mempertahankan pengaruh administratif Serbia secara tidak langsung dan melemahkan kontrol penuh Pristina atas wilayah yurisdiksinya. Oleh karena itu, meskipun alternatif ini relatif moderat dan didukung secara normatif oleh aktor internasional, Kosovo menilai opsi tersebut tidak sejalan dengan tujuan utama negara untuk menghapus struktur paralel dan menegaskan kedaulatan secara utuh pasca-serangan Banjska.

2. Penggunaan Dinar Serbia untuk Kebutuhan tertentu

Alternatif penggunaan dinar Serbia secara terbatas merupakan opsi kebijakan yang secara rasional dapat mengurangi gejolak sosial dan menjaga hubungan Kosovo dengan mitra internasional. Kebijakan ini dapat diinisiasi dengan penggunaan dinar hanya untuk bantuan dan transfer dana untuk sekolah atau rumah sakit Serbia. Komunitas Serbia dapat melakukan transaksi dengan warga dan lembaga Kosovo menggunakan Euro, namun untuk kebutuhan yang bersumber dari Serbia tetap menggunakan Dinar Serbia. Meskipun kebijakan ini dianggap tidak etis oleh organisasi internasional, menurut kalkulasi pemerintah Kosovo,

alternatif ini tetap mempertahankan jalur pengaruh administratif Serbia dan berpotensi memperpanjang praktik *dual authority* di Kosovo Utara. Opsi ini tidak dipilih karena dinilai tetap mempertahankan jalur kontrol finansial Serbia terhadap komunitas Serbia di Kosovo. Sesuai tujuan awal, Kosovo memilih pelarangan total penggunaan dinar sebagai keputusan yang dianggap paling tepat dan tegas untuk memantapkan kontrol negara dan menghapus pengaruh eksternal dalam jangka panjang.

3. Penutupan Institusi Ilegal Secara Bertahap setelah Pemilu

Penutupan institusi Serbia secara bertahap setelah pemilu merupakan salah satu alternatif kebijakan yang secara rasional dapat dipertimbangkan oleh pemerintah Kosovo. Pendekatan ini memungkinkan adanya masa transisi melalui mekanisme administratif dan hukum sebelum penutupan dilakukan secara penuh. Melakukan pemetaan kantor ilegal ini juga dapat membantu pemerintah Kosovo mencegah dualisme paralel. Mengapa dilakukan setelah pemilu? Kosovo harus menyadari bahwa dukungan besar terhadap kedaulatannya berasal dari Amerika Serikat dan Uni Eropa, tindakan represif seperti penutupan institusi secara bersamaan di beberapa titik dapat mempengaruhi pandangan politik negara lain terhadap Kosovo. Selain dituduh sebagai aksi teror oleh Serbia, tindakan ini dapat dianggap sebagai alat kampanye. Namun, dalam konteks pasca-Serangan Banjska, pendekatan bertahap ini juga mengandung risiko mempertahankan struktur paralel lebih lama dan membuka ruang bagi Serbia untuk tetap mempertahankan pengaruh politiknya di Kosovo Utara sehingga pemerintah Kosovo tidak memilih opsi tersebut karena dianggap tidak sejalan dengan kebutuhan konsolidasi kedaulatan secara cepat dan tegas.

3. Consequences

Konsekuensi atau akibat dari kebijakan serta alternatif kebijakan pasca konflik Banjska dapat dijelaskan sebagai berikut :

Kebijakan dan Alternatif	Konsekuensi
Melakukan penutupan jalan ilegal yang menghubungkan Kosovo dan Serbia	Mengalami banyak penolakan dari mayoritas komunitas Serbia karena menjadi jalur alokasi bantuan dari pemerintah. Konsekuensi ini dipahami sebagai risiko kebijakan yang disadari oleh pemerintah Kosovo, kebijakan ini dipilih karena dinilai efektif membatasi pergerakan kelompok bersenjata dan mengurangi kapasitas intervensi Serbia melalui jalur informal. Didukung oleh Uni Eropa, KFOR, dan Amerika

	Serikat sebagai bentuk pencegahan dan perlindungan bagi masyarakat pasca konflik.
<i>Joint-Policing</i> dalam pengawasan Uni Eropa di daerah perbatasan	Pengawasan dilakukan oleh Uni Eropa, kekhawatiran terkait kontrol wilayah oleh pemerintah Kosovo mulai menipis, perekrutan perwakilan komunitas Serbia yang dapat membuka celah <i>dual authority</i> karena memberikan otonomi. Risiko tersebut dipandang signifikan karena berpotensi melemahkan kontrol negara atas wilayah perbatasan. Meskipun opsi ini dapat meredam ketegangan jangka pendek, Kosovo tidak memilih <i>joint-policing</i> karena dinilai bertentangan dengan tujuan konsolidasi kedaulatan pasca-Serangan Banjska.
Pelarangan total penggunaan Dinar Serbia sebagai alat transaksi	Kebijakan ini menimbulkan tanggapan negatif oleh UE dan Amerika Serikat karena menghalangi komunitas Serbia mendapatkan bantuan sosial dari Serbia. Tindakan ini tidak disertai penyesuaian khusus atau diplomasi dari pemerintah Kosovo dalam penggunaan Euro. Namun, kebijakan ini dipahami sebagai langkah strategis untuk menghapus dualisme otoritas dan memutus jalur kontrol finansial Serbia terhadap komunitas Serbia di Kosovo Utara. Ketiadaan mekanisme transisi atau diplomasi dalam penerapan euro mencerminkan prioritas Kosovo terhadap konsolidasi kedaulatan fiskal dibandingkan kompromi jangka pendek.
Penggunaan Dinar Serbia untuk kebutuhan tertentu	Suatu waktu Serbia dapat menggunakan momentum ini sebagai alat untuk mengontrol alur kebijakan fiskal Kosovo. Selain itu, kebijakan ini mengkhawatirkan apabila Dinar Serbia digunakan sebagai alat transaksi kejahatan transnasional yang dapat menimbulkan kekerasan antar aparat keamanan dan komunitas Serbia. Riisiko tersebut dinilai

	<p>tidak sebanding dengan manfaat stabilisasi jangka pendek yang ditawarkan oleh kebijakan ini. Oleh karena itu, alternatif ini tidak dipilih karena dianggap tidak sesuai tujuan awal.</p>
<p>Penutupan kantor Serbia di Kosovo secara serentak</p>	<p>Akan mempersulit layanan publik sehari-hari bagi masyarakat Serbia yang masih bergantung pada layanan administratif dari Serbia. Penutupan serentak berisiko memicu ketegangan tinggi antara aparat Kosovo dan komunitas Serbia karena perubahan dilakukan tanpa masa transisi. Dampak tersebut dipahami sebagai biaya jangka pendek yang dapat memicu instabilitas sosial. Konsekuensi inilah yang menjadikan opsi ini dipertimbangkan dengan hati-hati, mengingat potensi kerusakan stabilitas domestik yang justru bertentangan dengan tujuan jangka panjang konsolidasi keamanan Kosovo.</p>
<p>Penutupan institusi ilegal secara bertahap setelah pemilu</p>	<p>Proses ini dapat dimanfaatkan Serbia untuk mempertahankan pengaruh politik di wilayah mayoritas Serbia selama masa transisi. Implementasi bertahap juga berpotensi diasumsikan sebagai sikap yang kurang tegas terhadap struktur paralel yang terjadi di Kosovo yang memunculkan kritik domestik. Jeda waktu yang lama dapat meningkatkan kesempatan terhadap tekanan eksternal. Serbia punya kemungkinan melakukan mobilisasi melalui perencanaan strategi dengan komunitas Serbia sebelum penutupan institusi dijalankan. Meskipun pendekatan bertahap tampak lebih moderat, risiko strategis jangka menengahnya dianggap lebih besar dibandingkan manfaat stabilisasi sementara.</p>

Sumber : Penulis

Konsekuensi menimbang keuntungan dan kerugian suatu kebijakan untuk jangka waktu yang lama. Kebijakan atau keputusan akhir juga harus memenuhi prinsip awal dan tujuan negara untuk kepentingannya. Dalam hal ini, Kosovo telah memprediksi keuntungan yang mereka dapatkan dari setiap alternatif yang tersedia. Meskipun menimbulkan kritik dan keprihatinan terhadap keputusan negara, Kosovo tetap mengeluarkan kebijakan tersebut sebagai langkah mereka menghapus otoritas ganda di wilayahnya sembari mempertegas kedaulatan negara dan bukan bagian dari Serbia.

4. Choice

Tahapan ini menjelaskan bahwa aktor atau pemangku kebijakan harus menentukan kebijakan yang paling rasional dan ideal dengan memilih alternatif kebijakan yang dianggap paling menguntungkan dibandingkan dengan opsi yang lain dalam suatu situasi. Kosovo melihat situasi pasca konflik Banjska sebagai alarm untuk menegaskan kembali wewenang negara yang utuh dan legitimasi hukum agar diakui secara menyeluruh dan dipatuhi oleh semua masyarakat yang menetap dalam yurisdiksinya. Tindakan penyerangan yang berasal daerah-daerah yang ditinggali komunitas Serbia di bagian Kosovo Utara menunjukkan pelanggaran atas kedaulatan negara, respon yang tepat untuk menyikapi hal tersebut adalah mengeluarkan kebijakan dengan kontrol yang ketat dan menghambat ruang gerak.

Penutupan jalan menuju Serbia dan menetapkannya sebagai jalan “ilegal”, penghapusan penggunaan Dinar Serbia, dan penutupan institusi “ilegal” Serbia merupakan keputusan rasional bagi Kosovo dengan memperhitungkan untung dan rugi yang akan diterima. Paling penting, kebijakan ini merupakan upaya Kosovo mempertahankan kontrol terhadap wilayahnya dan menghilangkan pengaruh Serbia dalam proses pengambilan keputusan. Pilihan kebijakan ini mencerminkan rasionalitas negara dalam situasi konflik intra-negara yang terinternasionalisasi, di mana kebutuhan akan legitimasi dan keamanan dipandang lebih mendesak dibandingkan kompromi diplomatik sementara. Kosovo juga harus mempertimbangkan kebijakan yang bisa menyelesaikan masalah lebih cepat, sekaligus memberi tekan terhadap pihak-pihak yang berpotensi mengancam kedaulatan dan stabilitas negara.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan kebijakan pemerintah Kosovo terhadap komunitas Serbia di Kosovo Utara pada periode 2023–2025 merupakan hasil dari proses pengambilan keputusan yang rasional dalam konteks konflik intra-negara yang terinternasionalisasi. Serangan Banjska berfungsi sebagai titik kritis yang mengungkap keterbatasan pendekatan kebijakan sebelumnya, sekaligus mempertegas urgensi konsolidasi kedaulatan dan keamanan negara. Kebijakan-kebijakan yang sentralistik di atas adalah hasil

pengamatan dan pemetaan keuntungan dan kerugian bagi pemerintah Kosovo terhadap situasi yang sedang tidak stabil. Dianalisis menggunakan kerangka *Rational Actor Model* dari Allison dan Zelikow (1999) dari tahapan *Goals and Subjectives*, pemerintah Kosovo ingin membangun kekuatan pemerintah yang sah serta menghapus dual authority bersama Serbia, yang akhirnya menetapkan institusi, jalur, serta mata uang Serbia adalah ilegal. *Alternatives* dalam situasi ini selain kebijakan yang sudah diterapkan lebih progresif sementara Kosovo harus menindak tegas pihak eksternal yang mengancam keamanan wilayah. Sementara *Consequences* dan *Choice* saling berhubungan dikarenakan hasil perhitungan untung dan rugi terhadap alternatif yang tersedia akan menentukan keputusan akhir yang rasional dan sesuai dengan *nation interest*. *State rationality in policy making* dalam studi kasus Kosovo pasca serangan Bansjka bersifat identik dengan pendekatan *Rational Actor Model*, di mana pengambilan keputusan dipahami sebagai proses kalkulasi rasional atas tujuan, alternatif, dan konsekuensi dalam situasi tekanan domestik dan internasional. Temuan ini sejalan dengan argumen bahwa dalam konteks konflik yang melibatkan aktor eksternal, rasionalitas negara tidak selalu diwujudkan melalui kompromi diplomatik dan pihak ketiga, melainkan melalui kebijakan tegas yang dipandang mampu menjamin stabilitas dan kontrol negara dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Afinotan, L. A. (2014). Decision Making in International Relations: A theoretical Analysis. *Canadian Social Science*, 10(5), 249-256. <https://doi.org/10.3968/4970>
- AP News. (2024, May 21). *EU reprimands Kosovo's move to close down Serb bank branches over the use of the dinar currency*. Retrieved from AP News: <https://apnews.com/article/eu-kosovo-serbs-dinar-ban-euro-tension-1f58dcd11f6ee92bc0fa281e15aa3093>
- Associated Press. (2023, September 26). *Apa yang Berada di Balik Konflik Terbaru antara Serbia dan Kosovo?* Retrieved from VOA Indonesia: <https://www.voaindonesia.com/a/apa-yang-berada-di-balik-konflik-terbaru-antara-serbia-dan-kosovo-/7284067.html>
- Bami, X., & Stojanovic, M. (2025, January 15). *Kosovo Claims it Closed All Serbia-Run 'Parallel Institutions'*. Retrieved from Balkan Insight: <https://balkaninsight.com/2025/01/15/kosovo-claims-it-closed-all-serbia-run-parallel-institutions/>
- Bechev, D. (2023, October 3). *Analysis: Are Kosovo and Serbia on the brink of war?* Retrieved from Al Jazeera: <https://www.aljazeera.com/features/2023/10/3/are-kosovo-and-serbia-on-the-brink-of-war#:~:text=On%20September%202024%2C%20armed%20Serb,the%20Kosovo%20war%20in%201999.>

- BIRN. (2008, April 22). *Kosovo's Population at 2.1 million*. Retrieved from Balkan Insight: <https://balkaninsight.com/2008/04/22/kosovo-s-population-at-2-1-million/#:~:text=%E2%80%9CThe%20overall%20resident%20population%20of%20Kosovo%20is,around%202.7%25%2C%E2%80%9D%20the%20latest%20ESK%20of%20indings%20show.>
- Boslaugh, S. (2007). *Secondary Data Sources for Public Health: A Practical Guide*. Cambridge University Press. .
- Call, C. T., & Cousens, E. M. (2007). What is Peacebuilding? In E. M. Cousens, & C. T. Call, *Ending Wars and Building Peace* (p. 2). International Peace Academy.
- Chary, F. B. (2023). *Kosovo conflict The Event Ethnic conflict between Serbs and Albanians in Kosovo*. Retrieved from EBSCO: <https://www.ebsco.com/research-starters/history/kosovo-conflict>
- Creswell, J. W. (2009). *Third Edition Research Design Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. SAGE Publication. <https://doi.org/978-1-4129-6557-6>
- DeCanio, S. (2025). Introduction: Rationality and The State in International Relations. *Critical Review*, 36(4), 414-415. <https://doi.org/doi.org/10.1080/08913811.2024.2460872>
- EWB. (2025, January 15). *EEAS: Kosovo's closure of Serbia-supported structures goes against its obligations under the normalisation process*. Retrieved from European Western Balkans: <https://europeanwesternbalkans.com/2025/01/15/eeas-kosovos-closure-of-serbia-supported-structures-goes-against-its-obligations-under-the-normalisation-process/>
- Fella, S. (2024, April 29). *Kosovo: developments since 1999 and relations with Serbia*. Retrieved from House of Commons Library: <https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-10012/#:~:text=Serbia%20and%20Russia%20oblamed%20Kurti,the%20decision%20to%20take%20effect.>
- Geoghegan, P. (2013, November 19). *Living apart*. Retrieved from DW News: <https://www.dw.com/en/serbs-still-find-it-hard-living-in-kosovo/a-17239567#:~:text=Serb%20resistance,everything%20from%20fuel%20to%20firearms.&text=%22Putting%20law%20and%20order%20on,That%20Mitrovica%20is%20changing.%22>
- Graham, A., & Zelikow, P. (1999). *Essence of Decision Making: Explaining Cuban Missile Crisis 2nd Edition*. Longman. <https://doi.org/0-321-01349-2>
- International Crisis Group. (2024, April 2). *Northern Kosovo: Asserting Sovereignty amid Divided Loyalties*. Retrieved from International Crisis Group: <https://www.crisisgroup.org/europe-central-asia/balkans/kosovo/269-northern-kosovo-asserting-sovereignty-amid-divided-loyalties>
- KOHA. (2023, November 3). *After the attack in Banjska, 30 illegal roads are closed*. Retrieved from KOHA: <https://www.koha.net/en/arberi/qe-nga-sulmi-ne-banjske-njesite-per-nderhyrje-te-shpejte-e-kfor-i-shtojne-patrullimet-ne-veri>

- KOHA. (2024, June 22). *Removal of Serbs from institutions in the north - Some asked to return, but it was too late*. Retrieved from KOHA: <https://www.koha.net/en/arberi/largimi-i-serbeve-nga-institucionet-ne-veri-disa-kerkuan-te-kthehen-por-ishte-vone>
- Krasniqi, J. (2024, September 25). *Annual Review of Kosovo's Foreign Policy (2023)*. Retrieved from Konrad-Adenauer-Stiftung: <https://www.kas.de/documents/286052/0/Belegexemplar+24-07-10+Annual+Review+of+Kosovo%27s+Foreign+Policy+ENG.pdf/2c0cc6ea-7bdd-13a9-fa9c-91808f62ade3?version=1.0&t=1727353457925>
- Paris, R. (2004). The Origins of Peace Building. In R. Paris, *AT War's Ends Building Peace After Civil Conflict* (pp. 8-13). Cambridge University Press.
- Prelec, M. (2023, June 7). *Behind the Renewed Troubles in Northern Kosovo*. Retrieved from International Crisis Group: <https://www.crisisgroup.org/behind-renewed-troubles-europe-balkans-northern-kosovo>
- Setiawan, A., & Sulastri, E. (2017). *Pengantar Studi Politik Luar Negeri*. UMJ Press. <https://doi.org/978-602-6301-16-9>